



# MIMIKA MEMBANGUN

*Eme Neme Yauware*





## Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, Media Bappeda ini kami hadirkan sebagai implementasi dari tanggungjawab kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, serta mental spiritual, secara bersamaan dan sinergis, dengan melibatkan semua unsur dalam pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Media ini adalah dokumentasi atas sebagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami persembahkan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi atas kiprah pemerintah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas Media ini dan bagi kemajuan pembangunan di Mimika.

**Tim Redaksi**

### Pengarah

Bupati Mimika

### Penanggungjawab

Kepala Bappeda

### Tim Redaksi

#### Koordinator

Sekretaris Bappeda Mimika

#### Anggota :

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Pengendalian

Kantor Bappeda Kabupaten Mimika  
Jl. Cendrawasih SP.II, Utikini Baru,  
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. 99963



# Mimika Membangun Edisi Agustus

## Daftar Isi

- Laporan Utama Hal. 3-6
- Laporan Khusus Hal. 7-21
- Bidang Infrastruktur Hal. 22-23
- Bidang Sosial Budaya Hal. 24-36
- Bidang Ekonomi Hal. 37-47





## Hadiah HUT RI ke-78

# Warga Koperapoka Mimika Akhirnya Menikmati Air Bersih

**W**ARGA Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika mendapat hadiah spesial di momen hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Mulai Senin (14/8/2023) sebanyak 1.500 rumah akhirnya bisa menikmati air bersih yang disediakan

oleh pemerintah.

Pencanangan dilakukan oleh Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito didampingi Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mimika, Robert Mayaut, Anggota DPRD

Mimika Nurman Karupukaro serta pimpinan OPD lingkup Pemkab Mimika.

Pj Bupati Mimika, Valentinus mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Sebab air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat



**Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito mencanangkan air bersih di Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru.**

Foto: Bappeda





yang dibutuhkan setiap saat baik di musim kemarau maupun penghujan.

Pemkab Mimika sudah berupaya dengan membangun fasilitas air bersih dimulai Tahun 2012 namun hingga Tahun 2022 baru mencapai 33 persen karena membutuhkan dukungan anggaran cukup besar. "Kita lakukan bertahap yang penting kita sudah mulai hal baik terkait air bersih dan dukungan pemerintah kepada masyarakat harus nyata," katanya.

Pj Bupati mengatakan, Pemkab Mimika bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia membangun instalasi peng-

olahan air di Kuala Kencana. Fasilitasnya sudah tersedia namun untuk pengoperasian akan dilakukan MoU terlebih dahulu. Dalam MoU itu, Pemkab berharap PTFI masih menanggung operasional termasuk listrik. "Dukungan kita bersama sejahterakan masyarakat mulai dari ketersediaan air bersih," tandasnya.

Bahkan Pj Bupati berharap masyarakat di Mimika terutama yang ada di Kota Timika dan pinggiran bisa menikmati air bersih langsung minum sama seperti di Kuala Kencana. Sebab ia melihat adanya perbedaan yang sang-

at jomplang antara Kuala Kencana dengan Kota Timika soal air bersih. "Kita berharap seluruh air yang ada bisa langsung diminum seperti di Kuala Kencana, mudah-mudahan saling mendukung untuk sejahterakan masyarakat karena banyak dampak yang ditimbulkan dari air yang tidak bersih terutama kesehatan jadi itu tujuan utama kita," tegasnya.

Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Mayaut menjelaskan bahwa untuk tahap pertama ada 1.500 rumah yang bisa menikmati air bersih di Kelurahan Koperapoka. Masih menggunakan sumber







air dari sumur bor sambil menunggu pengoperasian IPA dari Kuala Kencana. Sebab belum ada serah terima dari Freeport kepada Pemda. Ditargetkan sumber air Kuala Kencana bisa digunakan setelah minimal 7888 sambungan rumah sudah terpasang.

Untuk 1.500 rumah di Koperapoka pada tahap awal masih dibebaskan biaya atau gratis karena belum ada regulasi yang menjadi dasar penarikan retribusi dari masyarakat.

Ia juga menjelaskan soal progres proyek air bersih yang dimulai Tahun 2012 dan hingga Tahun 2022 sudah menyerap

anggaran sebesar Rp 111 miliar baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultan. Berdasarkan engineering estimate yang direview Tahun 2014 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 375 miliar. Sehingga jika dipersentasikan baru mencapai 33 persen.

Anggaran itu digunakan untuk pemasangan pipa jaringan distribusi utama, jaringan distribusi sekunder dan jaringan sambungan rumah. Untuk sambungan rumah sudah menjangkau sejumlah wilayah mulai dari Kelapa Dua hingga Jalan Sam Ratulangi, kemudian Jalan Poros SP 2 – SP 5, Jalur 1 – Jalur 4 Timika Jaya, area Otomona dan area Koperapoka.

Tahun 2023, Dinas PUPR mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk lanjutan pembangunan proyek air bersih. Anggaran itu digunakan untuk pemasangan jaringan pipa distribusi, sambungan rumah sebanyak 7888. Pembangunan ground water tandan dan reservoir di SP 1 dan SP 4 masing-masing dengan kapasitas 200 meter kubik lengkap dengan mekanikal, elektrikal dan plumbing GWT. Pembangunan gedung untuk tambahan power house IPA Kuala Kencana, sistem listrik dan penangkal petir untuk IPA di Kuala Kencana.





## Butuh Rp 511 Miliar Tuntaskan Proyek Air Bersih di Mimika

AIR bersih di Mimika masih jadi persoalan utama. Pemerintah Kabupaten Mimika sudah memulai pembangunan fasilitas air bersih sejak Tahun 2014 namun belum juga rampung. Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Mayaut menyebut anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp511 miliar untuk bisa mengalirkan air ke 50 ribu rumah.

Robert mengungkapkan pada awal perencanaan Tahun 2014 proyek air bersih membutuhkan anggaran sekitar Rp 375 miliar. Tapi setelah dilakukan review menyesuaikan dengan kondisi harga karena inflasi maka estimasi anggaran melonjak menjadi Rp511 miliar.

Sementara dari sisi kebijakan anggaran yang dialokasikan Pemkab Mimika sejak Tahun 2014 hingga

Tahun 2022 baru mencapai Rp 110 miliar. Adanya kebijakan prioritas penganggaran untuk pembiayaan air bersih mulai Tahun 2023 ini dengan alokasi Rp 60 miliar. Bahkan akan ditambahkan sebesar Rp 20 miliar sehingga progresnya bisa lebih cepat.

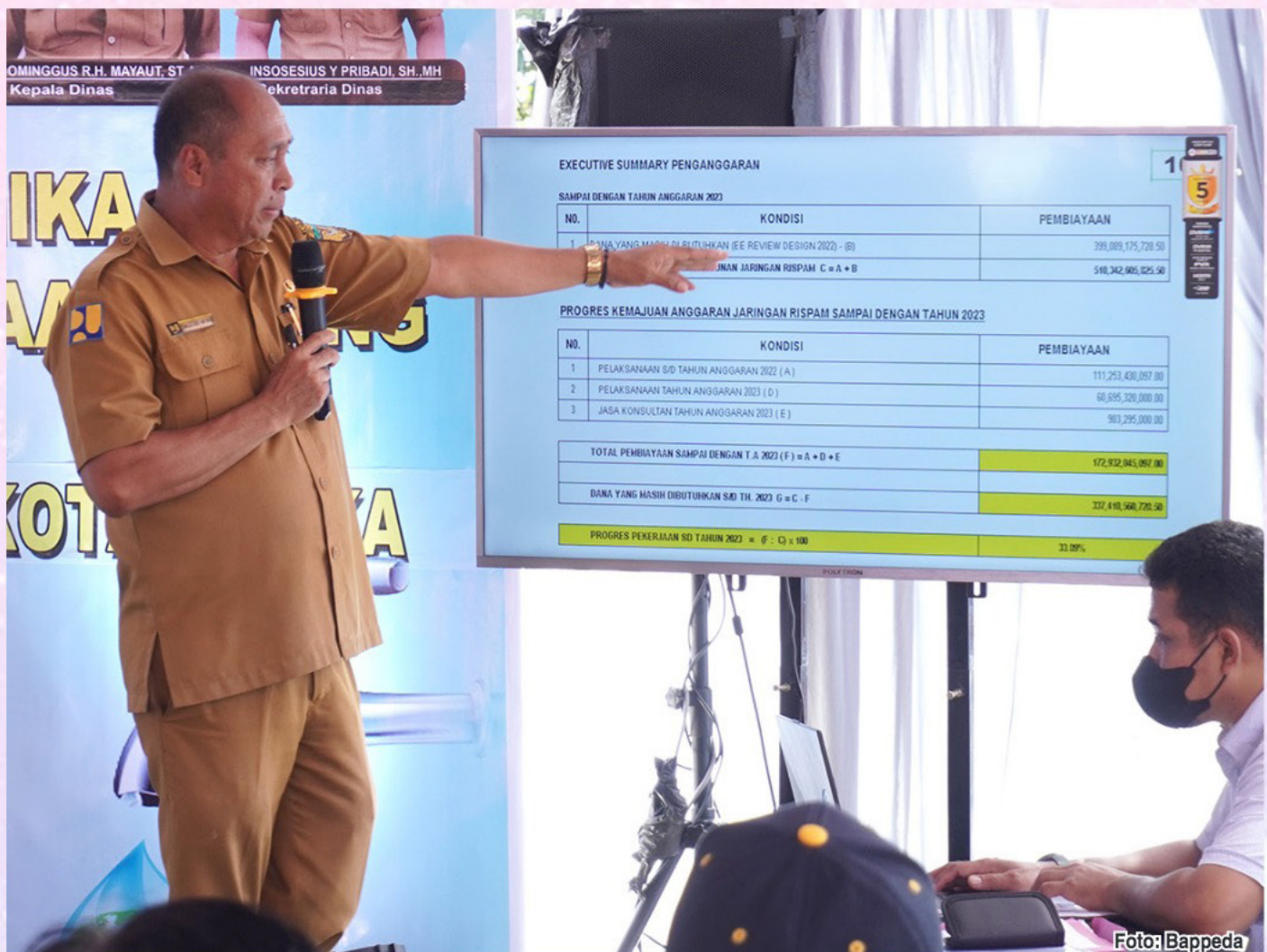
Sembari menunggu proyek air bersih tuntas, pada bulan ini, Dinas PUPR Mimika akan mengoperasikan air bersih di wilayah Koperapoka, Distrik Mimika Baru. Pada tahap awal ditarget sekitar 1.500 sambungan rumah akan terpasang dan bisa menikmati air bersih.

Untuk melayani sekitar 1.500 rumah ini belum menggunakan sumber air dari Kuala Kencana tetapi menggunakan sumur bor yang sudah dibangun sebelumnya. Meski menggunakan sumur bor, dipastikan kualitas air lay-

ak dikonsumsi karena telah melalui proses pengujian oleh Dinas Kesehatan Mimika. Namun bukan air yang langsung minum tapi sebagai air baku untuk kebutuhan sehari-hari.

Pencanangan dijadwalkan pada 14 Agustus 2023 mendatang. Ini sesuai dengan target yang diberikan oleh Pj Bupati Mimika kepada Dinas PUPR untuk mengalirkan air bersih ke rumah masyarakat.

Robert menambahkan, sumber air masih menggunakan sumur bor karena untuk pengoperasian water treatment plant atau instalasi pengolahan air yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana membutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Juga belum ada serah terima dari PTFI kepada Pemkab Mimika. (BAPPEDA)



Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut memaparkan masterplan pembangunan fasilitas air bersih di Mimika.



Dari Pidato Jokowi

# Pj Bupati Mimika: Kerja Buat Masyarakat

**S**UDAH menjadi agenda negara setiap tahun, dimana setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan di depan MPR, DPR dan DPD RI. Presiden Joko Widodo yang tampil dengan pakaian adat Tanimbar, Maluku Tenggara Barat menyampaikan berbagai hal baik itu isu pembangunan, keuangan negara hingga situasi politik di Indonesia.

Pidato kenegaraan ini juga disaksikan oleh Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito bersama pimpinan dan anggota DPRD Mimika serta Forkopimda dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (16/8/2023).

Bagi Pj Bupati Mimika, ada banyak

hikmah dari pidato Presiden Joko Widodo. Ia bahkan belajar dari sikap kepala negara tersebut yang mengajarkan agar tetap bekejera. "Sebagai pimpinan negara, mengajarkan kepada kita untuk betul-betul intinya cuma kerja, kerja, kerja. Urusan orang mau ngomong apa yang penting kerja yang terbaik buat masyarakat," katanya.

Menurutnya, sikap dari Presiden Joko Widodo mengajarkan seluruh elemen bangsa terutama para pemimpin untuk lebih rendah hati untuk masyarakat. Sebab sudah menjadi konsekuensi sebagai seorang pelayan masyarakat ketika ada yang tidak puas pasti akan menyampaikan kri-

tikan dan itu sebuah hal yang wajar.

Namun dalam penyampaian itu harus tetap dilakukan secara santun. Pj Bupati menegaskan pemerintah tidak alergi dengan kritikan atau masukan dari siapapun. Ia bahkan bersyukur, karena kritikan menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak seenaknya jalan tapi dengan kritikan menjadi masukan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan.

Pj Bupati juga menambahkan, di momen HUT RI ke-78 kali ini capaian pembangunan di Mimika bisa berjalan dengan baik. Ia pun tetap berkomitmen terus melanjutkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang digantikan sementara. (BAPPEDA)







# Upacara Pengibaran Bendera

**U**PACARA peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Mimika kali ini berbeda. Para pejabat dan tamu undangan hadir di Lapangan Upacara Kantor Pusat Pemerintahan, Kamis (17/8/2023) itu mengenakan pakaian adat yang menggambarkan keberagaman.







Foto: Bappeda

**Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi menyerahkan bendera kepada Siti Rukmana Anthomina Rumbiak, siswi SMA Negeri 1 Mimika yang bertugas sebagai pembawa baki dalam upacara HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.**

Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi mengenakan pakaian kebesaran Makassar sama seperti yang digunakan Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang berperang melawan penjajah. Pakaian adat ini disebut pakaian Tubarania oleh Suku Makassar yang melambangkan keberanian dan kesetiaan.

Pakaian yang digunakan Pj Bupati Mimika berwarna krem dengan sarung warna merah bermotif garis emas, lengkap dengan passapu atau pengikat kepala berwarna merah. Tak ketinggalan badih yang terikat di sisi kirinya.

Meski demikian, para peserta dari unsur TNI dan Polri tetap menggunakan pakaian dinas lengkap, sementara ASN memakai seragam Korpri. Begitu pula ormas yang turut hadir.







Bertindak sebagai komandan upacara, Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Julkifli Sinaga, SIK, MH lulusan Akpol Tahun 2013. Danki Paskibraka, Kanit Samapta Sek Pelabuhan Pomako, Ipda Lalu Hiskam Anady, SE.

Pengibaran Bendera Merah Putih dilakukan oleh pelajar SMA dan SMK di Mimika yang terpilih lewat seleksi. Siswi SMA Negeri 1 Mimika, Siti







Rukmana Anthomina Rumbiak, putri dari pasangan Vanpieter Rumbiak dan Lina Rumbiak terpilih sebagai pembawa baki atau pembawa bendera.

Bendera dikibarkan oleh Achmad Raihan Kaplele, Michael Mario Christiandro Ngoranubun dan Aloysius Virgii Bokeyau. (BAP-PEDA)





# Semarak HUT RI ke-78 di Mimika

**S**UDAH beberapa hari terakhir warga Mimika mulai sibuk dan larut dalam semarak menyambut perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Sukacita itu Nampak dari keikutsertaan warga dalam

berbagai perlombaan yang digelar Pemerintah Kabupaten Mimika.

Mulai dari karnaval yang diikuti Taman Kanak-kanak (TK),

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, paguyuban dan lainnya.





Kemudian dilanjutkan dengan lomba marching band dan Tari Seka khusus untuk kalangan pelajar SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Mimika. Tidak hanya para peserta, warga Timika juga turut serta memeriahkan meski hanya sebatas memberi dukungan dan menjadi penonton.

Pada Selasa (8/8) juga digelar lomba gerak jalan indah yang diikuti 119 kelompok mulai dari SMP, SMA dan SMK, OPD lingkup Pemkab Mimika, paguyuban dan ormas.

Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito saat melepas peserta lomba marching band dan Tari Seka merasa bangga dengan semangat dan antusiasme warga Mimika yang ikut serta dalam berbagai kegiatan dalam rangka HUT RI ke-78.

Menurutnya, ini merupakan salah satu wujud rasa nasionalisme dari masyarakat sekaligus dalam rangka mempererat persaudaraan di tengah keberagaman yang ada di Mimika. **(BAPPE-DA)**







# 119 Regu Ramaikan Gerak Jalan Indah

**P**ERINGATAN Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Mimika semakin semarak. Setelah sebelumnya ada karnaval budaya, lomba tari seka dan marching band, pada Selasa

(8/8/2023) sesuai jadwal panitia diselenggarakan lomba gerak jalan indah.

Terdaftar ada 119 regu atau kelompok yang mengikuti perlombaan. Para peserta dilepas oleh Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSI

di halaman Graha Eme Neme Yauwारे. Pj Bupati bahkan menyaksikan seluruh peserta mulai dari yang pertama hingga terakhir.

Untuk merebut hati para juri yang memberikan penilaian, setiap regu melantangkan yel-yel dan kreatifitas di depan Pj Bupati serta para pejabat yang hadir. Hal yang sama juga dilakukan di beberapa titik yang menjadi pusat-pusat dimana warga berkumpul untuk menyaksikan para peserta gerak jalan.

Pj Bupati Mimika, Valentinus mengatakan kegiatan ini dalam bentuk perlombaan ini merupakan bentuk semangat dan rasa nasionalisme dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga ia sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang begitu tinggi dan ikut berpartisipasi dalam setiap perlombaan.

"Bagi para peserta lomba gerak jalan, mari junjung tinggi sportifitas dan rasa nasionalisme kalian dalam berlomba, tunjukkan penampilan dan kreatifitas











# Semarak HUT RI ke-78 di Mimika

## Pemenang lomba lari maraton 21 Km



## Pemenang lomba lari maraton 5 Km





# Freeport Serahkan Bantuan Bendera dan 1000 Paket Sembako ke Pemkab Mimika

**S**EBAGAI bentuk dukungan dan partisipasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Mimika, PT Freeport Indonesia menyerahkan paket bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika.

Bantuan itu berupa Bendera Merah Putih sebanyak 500 lembar, umbul-umbul 250 lembar, snack untuk upacara sebanyak 1500 kotak, konsumsi resepsi 300 paket dan bahan bantuan sosial sebanyak 1000 paket.

Bantuan diserahkan oleh Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia, Jony Lingga kepada Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito didampingi Ketua Panitia HUT

RI ke-78, Petrus Lewa Koten pada Senin (14/8/2023) di Kantor Pusat Pemerintahan.

Pj Bupati Mimika, Valentinus Sumito mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari PT Freeport Indonesia dalam rangka HUT RI ke-78. Bantuan ini selanjutnya diserahkan kepada distrik untuk dipergunakan guna menunjang perayaan HUT RI di setiap distrik. "Diingatkan kepada seluruh kepala distrik, tolong cek kembali siapa yang berhak mendapatkan paket bantuan sosial tersebut," kata Pj Bupati.

Bukan hanya bantuan ini Pj Bupati menyebut ada beberapa agenda kerja sama yang sedang dibahas oleh Pemkab Mimika dengan PT Freeport

Indonesia. Salah satunya rencana membangun alun-alun sebagai ikon Mimika.

Ia menyebut, orang dari luar yang datang ke Timika sangat bangga ketika sudah berfoto di depan ban besar yang terpasang di terminal lama Bandara Mozes Kilangin sebagai pertanda sudah menginjakkan kaki di Mimika. Tapi itu saja tidak cukup, ikon baru akan dibangun yang memang menandakan wajah Mimika sebagai daerah tambang penghasil tembaga dan emas serta mengangkat budaya suku asli Amungme dan Kamoro.

Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia, Jony Lingga mengatakan setiap tahun Freeport se-



Foto: Bappeda

**Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia, Jony Lingga menyerahkan bendera kepada Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito.**





lalu mengambil bagian dalam peringatan HUT RI di Kabupaten Mimika. Meskipun ada perayaan secara internal namun keterlibatan bersama Pemkab Mimika dan masyarakat juga tetap ada. Bantuan selalu diberikan dan tahun

ini terbilang besar dalam bentuk bendera, umbul-umbul dan makanan untuk upacara dan resepsi serta paket bantuan sosial untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jonny juga menyebut bahwa ada

beberapa proyek yang sudah dicanangkan oleh Pj Bupati bekerjasama dengan PT Freeport Indonesia. "Apa yang menjadi usulan dari bapak Pj Bupati sejalan dengan kehadiran Freeport," katanya.(BAPPEDA)







# Upacara Tabur Bunga di Pomako

**M**EMULAI rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar upacara tabur bunga di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pomako pada Selasa (15/8/2023).







Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito bertindak sebagai Inspektur Upacara. Turut hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pimpinan OPD lingkup Pemkab

Mimika dan peserta upacara dari satuan TNI, Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Upacara tabur bunga ini sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan

secara khusus para pejuang kemerdekaan yang gugur di Papua dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain tabur bunga, juga dilakukan







pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 50 meter di PPI Pomako. Pj Bupati Mimika juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat di Pomako.

Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan sesuai tema HUT RI tahun ini, diharapkan terus terjadi perubahan dalam rangka ke-

majuan Indonesia terlebih khusus Mimika. Untuk itu ia selalu menekankan pentingnya transformasi dimulai dari pemerintahan. (BAPPEDA)







Perluasan Gedung A Kantor Pusat





Pemerintahan Kabupaten Mimika



# 120 Pejabat Pemkab Mimika Ikuti Pelatihan Kepemimpinan

**S**EBANYAK 120 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika mengikuti pelatihan kepemimpinan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPS-DM) Mimika bekerjasama Pemerintah Provinsi Papua.



Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi bersama Forkopimda dan para peserta pelatihan.

Foto: Bappeda



Para pejabat administrator dan pengawas ini akan mengikuti pelatihan selama beberapa bulan ke depan setelah dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito pada Senin (7/8/2023). Pelatihan pejabat administrator dijadwalkan berakhir 10 November 2023 dan pejabat pengawas berakhir pada 18 Desember 2023.

Metode pelatihan akan menerapkan sistem klasikal dan peserta akan diasramakan di Wisma Atlit. Kemudian ada juga agenda orientasi lapangan yang direncanakan dilaksanakan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Mendengar rencana peserta untuk melakukan orientasi ke Bali, Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menekankan agar tidak diman-



faatkan untuk sekadar jalan-jalan. Tapi Badung sebagai kabupaten terkaya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari pariwisata harus bisa menjadi motivasi bagi pe-

serta untuk diadopsi di Mimika. "Jadi jangan sekadar jalan-jalan karena Bali sangat bagus khusus untuk PAD dari sektor pariwisata," tegas Pj Bupati.







Pj Bupati juga menyatakan sudah saatnya Mimika membangun balai diklat sendiri. Namun ia meminta agar rencana pembangunan itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk itu perencanaan harus disusun sesuai dengan kondisi Mimika.

Hal itu ditekankan Pj bupati karena ia melihat ada banyak perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini OPD melibatkan orang dari luar yang tidak mengerti situasi di Papua. Ini tidak hanya di Mimika, tapi Valentinus yang juga Direktur

Otonomi Khusus Kemendagri menyatakan persoalan ini hampir terjadi di semua pemda di Papua.

"Ternyata perencanaan rata-rata dari luar, karena banyak yang sekolah di luar begitu jadi kepala dinas atau kepala bidang saat buat perencanaan







minta tolong teman yang di sana, alhasil saat mau melaksanakan bingung sendiri karena semua copy paste dari luar,” kata Pj Bupati.

Untuk itu Pj Bupati meminta para peserta pelatihan benar-benar mengikuti pelatihan untuk mengasah diri

bukan sekadar formalitas atau untuk mendapatkan jabatan. Sebab Pemkab sudah memfasilitasi pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi teknik manajerial, sosial dan kultural.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus

ada dalam diri seorang ASN yaitu knowledge, skill dan attitude. “Banyak orang pandai tapi tidak santun, ada juga yang santun tapi melupakan skill, jadi semua harus seimbang untuk menciptakan kualitas yang bagus dari seorang ASN,” tandasnya. (BAPPEDA)





# Jalur Pengangkatan 9 Kursi DPRD Mimika Diisi Orang Asli Papua

**P**ADA Tahun 2024 mendatang, 25 persen dari keanggotaan DPRD di tingkat kabupaten/kota di seluruh Papua diisi oleh orang asli Papua lewat jalur pengangkatan. Hal itu diungkapkan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi.





Valentinus yang saat ini ditugaskan menjadi Pj Bupati Mimika pada Rabu (30/8) mengungkapkan, kebijakan ini merupakan amanat Undang Undang Otonomi Khusus yang telah mengalami perubahan dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat Papua. Juga berdasarkan temuan dimana sebagian besar kursi di DPRD di seluruh kabupaten/kota di Papua didominasi oleh

orang non Papua.

Dalam pemaparannya Valentinus mengatakan total ada 254 kursi yang diperuntukkan bagi orang asli Papua lewat jalur pengangkatan sebagai perwakilan dari tokoh adat, tokoh agama dan perempuan. Jadi selain lewat pemilihan umum, ada pula anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota yang melalui pengangkatan khusus bagi orang asli







Papua. Terlebih khusus ditambahkan Valentinus, jalur pengangkatan itu pula 30 persen diberikan bagi perwakilan perempuan. Dicontohkan di Kabupaten Mimika, dari 35 kursi yang melalui pemilihan umum nantinya akan ditambah dengan 9 kursi dari jalur pengangkatan. Dari 9 kursi itu, 30 persen atau tiga kursi diberikan kepada perempuan asli Papua. "Inilah saatnya Papua butuh suara kaum ibu melakukan perubahan," tandasnya. Jadi pada Tahun 2024 mendatang, perwakilan perempuan asli Papua akan mengisi kursi di DPRD setiap kabupaten/kota di Papua. Bahkan akan semakin banyak apabila para calon anggota

legislatif dari kaum perempuan bisa menggunakan daya saing untuk mendapatkan kursi lewat jalur pemilihan. Kebijakan ini lanjut Pj Bupati merupakan keberpihakan kepada OAP melalui UU Otsus. "Perubahan yang sangat signifikan sangat diperlukan," kata Valentinus. (BAP-PEDA)

**Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi ketika memaparkan kebijakan terkait pengisian anggota DPRD tingkat kabupaten/kota di Papua.**



# Dua Cabang dari Mimika Sudah Lolos Kualifikasi PON XXI

**D**ENGAN diikutsertakannya, daerah otonom baru salah satunya Provinsi Papua Tengah pada Pekan Olahraga Nasional XXI (PON) mendatang di Aceh dan Sumatera Utara maka Kabupaten Mimika sebagai salah satu bagian dari Papua Tengah secara aktif mendorong cabang olahraga untuk turut serta.

Sekretaris Umum KONI Mimika, Agus Krey yang ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi di Hotel Swissbel, Kamis (31/8/2023) mengatakan dua cabang olahraga yaitu rugby dan muay thai sudah lolos babak kualifikasi.

Sementara cabang olahraga lainnya terutama cabang beregu juga sedang dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi atau Pra PON yang masih ber-

langsung hingga November 2023 mendatang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KONI Pusat.

Dengan lolosnya dua cabang tersebut dikatakan Agus Krey akan menjadi peluang besar bagi Papua Tengah untuk mendapatkan medali. Sehingga KONI bersama pengurus cabang akan melakukan pembinaan melalui training center. Hanya saja terkendala tempat terutama rugby yang belum punya lapangan khusus di Mimika sehingga tim akan menggunakan fasilitas yang ada di Jayapura dan dibiayai oleh KONI Mimika. "Paling tidak dalam TC tidak hanya latihan di tempat tapi juga pengalaman atlet mengikuti turnamen," katanya.

Cabang yang sedang dipersiapkan untuk mengikuti Pra PON adalah aeromodelling, paramotor dan terbang

layang. Atletnya sebagian besar adalah anggota TNI AU Yohanis Kapiyau yang kebetulan merupakan atlet nasional yang bertugas di Timika.

"Ini cabang yang atletnya dari TNI AU, memang ada dari kalangan sipil tapi karena ini mahal tidak semua orang akan ikuti dan jadi cabang kedirgantaraan. Beberapa atlet nasional sudah bertugas di Timika dan sudah diperintahkan Danlanud untuk difasilitasi karena berpotensi dapatkan medali, minimal perunggu atau perak," ujar Agus.

KONI Mimika juga telah melakukan pertemuan dengan KONI Papua sebagai induk organisasi awal, dimana KONI Mimika telah mengajukan 30 nama atlet yang akan mendapat wild card yang bisa langsung ke PON tanpa mengikuti kualifikasi. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Pengurus KONI Mimika melakukan pertemuan dengan Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi



# 96 Atlet Ikuti Turnamen Biliar di Mimika

**P**ERSATUAN Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Mimika kembali menggelar kejuaraan 9 Ball Open Tournament Billiard yang dirangkaikan dengan perayaan menyambut HUT RI ke-78.

Turnamen yang digelar di venue Biliar SP 2 Timika ini akan memainkan dua kelas atau nomor pertandingan yakni 9 ball khusus atlet orang asli Papua se-Kabupaten Mimika dan 9 ball se-Provinsi Papua untuk umum.

Adapun peserta 96 atlet terdiri dari 32 atlet asli Papua dan umum 64 orang atlet.

Untuk kategori umum berasal dari kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah. Dari Intan Jaya sebanyak 6 atlet, Dogiyai ada 2 atlet, Nabire 7 atlet dan Mimika sebanyak 81 atlet. Total hadiah yang diperebutkan sebesar Rp 67 juta ditambah trofi dan medali.

Pertandingan digelar selama lima

hari mulai Senin (7/8/2023) ditandai dengan sodokan pertama oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte bersama Ketua POBSI Papua Tengah, Natalis Tabuni.

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte mengatakan Mimika sangat terbuka untuk menjadi tuan rumah kejuaraan karena venue sudah tersedia. Dengan begitu venue yang dibangun untuk PON Tahun 2021 lalu tidak mubazir tapi bisa dimanfaatkan. Se-







Foto: Bappeda



**Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte dan Ketua POBSI Papua Tengah, Natalis Tabuni memukul bola pertama pada 9 Ball Open Tournament Billiard.**

lain venue biliar, ada juga gor futsal, venue panjat tebing dan Mimika Sport Complex yang dibangun PT Freeport Indonesia.

Pj Sekda berharap cabang olahraga lain bisa mengikuti jejak POBSI menggelar turnamen agar cabang olahraga terus hidup untuk menghasilkan atlet handal dari Papua. Bukan hanya sepakbola tapi cabang lain juga bisa bersinar di tingkat nasional bahkan internasional.

Ketua POBSI Papua Tengah, Natalis Tabuni mengungkapkan ini merupakan turnamen pertama di masa kepemimpinan POBSI Papua Tengah. Menurutnya, ini bukan sekadar turnamen biasa tapi sekaligus jadi ajang persiapan Papua Tengah menjelang PON XXI yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara mendatang.

Papua Tengah kata Natalis telah memiliki modal besar untuk menatap PON XXI. Sebab atlet yang mewakili Papua dan berhasil meraih 9 medali pada PON XX lalu akan memperkuat Papua Tengah pada PON XXI. "Kita optimis target dua medali emas yang pernah kita ukir di sini yaitu atlet putrid an snoker," ujarnya. (BAP-PEDA)



# Aksi Penurunan Stunting

**S**TUNTING atau masalah gizi kronis pada anak di bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Mimika masih cukup tinggi. Berdasarkan data sekitar 33 persen balita di Mimika mengalami stunting. Ini menempatkan Mimika berada di urutan 17 dengan kasus terbanyak dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua.

Menyikapi persoalan ini Pemkab Mimika telah melakukan beberapa aksi salah satunya membentuk tim percepatan penurunan stunting. Tim ini terdiri dari berbagai sektor mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, Puskesmas, rumah sakit dan pegiat kesehatan di Mimika.

Staf Ahli Pemkab Mimika, Septinus Timang dalam kegiatan diseminasi audit kasus stunting semester 1 Tahun 2023, mengatakan penanganan stunting harus menjadi salah satu isu yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah baik itu jangka pendek, menengah bahkan rencana strategis setiap OPD

terkait. Sebab Indonesia ditargetkan bebas stunting pada Tahun 2030.

Dokter RSUD Mimika, dr Carrina Nenggar Dewanti, SpA menjelaskan selama Tahun 2023, ada 7 balita yang dirawat di RSUD dan setelah dilakukan pengukuran ternyata mengalami stunting. Tapi balita tersebut dirawat bukan semata karena stunting tapi juga ada penyakit lain.

Ia menjelaskan, penyebab utama balita mengalami stunting karena asupan gizi tidak baik. Tapi juga ada yang disebabkan karena mengalami penyakit kronis. Ini terjadi karena kesalahan pemahaman ibu yang membuat asupan gizi pada balita tidak bagus. Dimana anak lebih banyak diberi makanan seperti bubur dicampur pisang atau labu padahal itu tidak menaikkan berat badan. Seharusnya lebih banyak makanan tinggi kalori dan seimbang yaitu protein, karbohidrat dan lemak.

Sebelum lahir, anak juga berpotensi

mengalami stunting sejak dari dalam kandungan. "Makanya program mulai dari pasangan usia subur, ketika mereka baru mau menikah sudah dipersiapkan supaya nanti pengetahuan gizinya bagus dia tidak stunting," jelas Carrina.

Pemberian susu formula pada anak juga sebenarnya tidak masalah. Tapi menurut Carrina, tidak semua bayi bisa menerima susu formula dengan baik. Berbeda dengan ASI yang memang bisa diserap sempurna oleh tubuh sang anak. "Jadi sebagus apapun, semahal apapun susu formulanya kalau bayi tidak bisa serap sama saja," tandasnya.

Ia menegaskan stunting menjadi isu besar karena jika anak mengalami stunting akan berpengaruh pada IQ. Anak yang bermasalah dengan stunting IQnya rendah. Itulah sebabnya, pemerintah sangat fokus dan berupaya agar asupan gizi pada anak bisa tertangani. **(BAPPEDA)**



Kegiatan diseminasi audit kasus stunting semester 1 Tahun 2023 di Kabupaten Mimika.

Foto: Bappeda



## Jadi Danbrigif 20/IJK-Kostrad

# Letkol Inf Yoga Komiten Hilangkan Image Tentara Arogan

**B**RIGADE Infanteri Raider 20/Ima Jaya Keramo atau Brigif 20/IJK-Kostrad sebagai brigade di bawah Komando Divisi Infanteri 3/Kostrad yang bermarkas di Timika sudah sebulan dipimpin oleh komandan baru yakni Letnan Kolonel Inf Raden Yoga Raharja.

Letkol Yoga mulai bertugas sejak 9 Juli 2023 setelah melakukan serah terima di Divisi 3/Kostrad Makassar dengan pejabat sebelumnya. Sejak saat itu, lulusan AKABRI Tahun 2001 ini mulai bertugas di Timika.

Setelah lulus, Letkol Yoga mengawali karirnya di Satuan 81 Kopassus di Cijantung. Ia bertugas di satuan elit TNI Angkatan Darat itu cukup lama hingga mendapat pangkat Letnan Kolonel dan menjadi Komandan Batalyon di Satuan 81 Kopassus. "Kemudian saya ikut lomba dan menang, berangkat jadi Komandan Satgas Indonesia Force Protection Company (Indo FPC) di PBB Lebanon," katanya.

Begitu kembali, ia kemudian ditugaskan menjadi Komandan Kodim 1311/Morowali di Sulawesi Tengah mulai Tahun 2018 sampai awal Tahun 2022. Di usianya yang masih muda, dari angkatannya Yoga termasuk dari beberapa yang memiliki karir gemilang hingga sudah berpangkat Letnan Kolonel.

Menjadi Komandan yang membawahi tiga brigade yakni Brigif 20/IJK, Yonif Raider 754/Eme Neme Kangasi di Timika dan Yonif Raider 755/Yalet di Merauke merupakan tanggungjawab besar baginya.

"Saya punya motto, diri kita ini bermanfaat buat keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. TNI lahir dari



Komandan Brigif 20/IJK-Kostrad, Letkol Inf Raden Yoga Raharja (kanan)

Foto: Bappeda

rakyat, untuk rakyat dan digunakan untuk melindungi rakyat bukan untuk menyakiti rakyat," tegasnya.

Selain menjalankan tugas pertahanan dan tempur, ia juga akan melakukan program teritorial yang berorientasi pada pendekatan humanis. Ia menyatakan keberadaan Brigade Infanteri harus bermanfaat, apalagi dengan jumlah pasukan yang cukup banyak akan dikerahkan untuk melakukan bakti sosial seperti pengobatan massal untuk masyarakat.

Pasukan juga akan dikerahkan untuk kegiatan pembersihan Kota Timika sebagai bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat dan keberadaannya bermanfaat. "Anggota kita kan banyak termasuk Yonif 754 sehingga bisa kita

kerahkan untuk membantu masyarakat di sini sehingga Kota Timika aman, tenang kita selalu koordinasi dengan Kepolisian dan Kodim dimana kita bisa berbuat karena pasukan kita paling banyak," jelasnya.

Salah satu hal yang jadi prioritas dan menjadi komitmen dari Letkol Inf Yoga adalah menghilangkan image tentara arogan. Hal ini sudah ia terapkan sejak menjadi Komandan Batalyon di Satuan 81 Kopassus. Meskipun itu pasukan tertinggi di TNI AD tapi image tersebut dihilangkan.

"Kita tidak boleh arogan karena kita ini dari orang biasa juga, pakaian kita saja yang berbeda. Kalau kita di keluarga sama saja kita masyarakat, tidak ada bedanya," tutupnya. (BAPPEDA)



# 130 Warga Binaan Lapas Timika Dapat Remisi HUT Kemerdekaan RI

**S**EBANYAK 130 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Timika mendapatkan remisi, atau pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada HUT Kemerdekaan RI ke-78, Tahun 2023. Pemberian remisi itu diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi, di Lapas Kelas IIB Timika pada Kamis (17/8/2023).

Yang mana pemberian remisi itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,

Nomor : PAS 1390 PK 05, 04 Tahun 2023, tentang pemberian remisi umum Tahun 2023, dan pengurangan masa pidana Remisi Umum (RU) Tahun 2023.

Kepala Lapas Kelas IIB Marthen Rake Palinoan, SH MH menjelaskan dari total 130 orang warga binaan yang mendapatkan remisi, 2 orang dinyatakan bebas.

"Total yang kita usulkan itu 194 orang, tapi yang disetujui itu 130 orang. Dimana dua orang langsung bebas, sementara 128 orang itu dapat remisi umum," kata Kepala yang ditemui di Lapas Kelas IIB Timika.

Lebih lanjut ia mengatakan warga binaan yang mendapatkan remisi harus memenuhi beberapa kriteria penilaian di antara harus berkelakuan baik.

"Selain berkelakuan baik, warga binaan juga harus menjalani 6 bulan pidana di lapas barulah bisa kita usulkan," ungkap Marthen Rake.

Sebab itu Kalapas berharap warga binaan Lapas Kelas IIB Timika yang mendapatkan remisi di HUT Kemerdekaan RI ke-78 ini, agar tetap mempertahankan perilaku mereka selama berada di Lapas Kelas IIB Timika. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

**Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi memberi ucapan selamat kepada warga binaan yang mendapat remisi.**



# Lurah dan Kepala Kampung Jalani Tes Pemeriksaan Narkoba

**S**EBAGAI upaya untuk pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika menggandeng para lurah dan kepala kampung dalam pengembangan dan pembinaan kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba.

Selain untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam pencegahan narkoba, BNNK juga langsung mengajak para lurah dan kepala kampung melakukan pemeriksaan urine. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan pertemuan koordinasi yang digelar Rabu (23/8/2023) di Hotel Grand Tembaga.

Kasubag Umum BNNK Mimika Ruslan Awumbas mengatakan tes urine

digunakan untuk mendeteksi beberapa jenis narkoba, seperti kokain, ganja, nikotin, dan barbiturat kepada para kepala lurah dan kampung. Ia mengungkapkan, ada 20 lurah dan kepala kampung yang menjalani tes urine. Hasilnya semua dinyatakan bebas narkoba.

Tes ini kata dia bertujuan untuk melakukan pencegahan dini kepada kepala kelurahan dan kampung yang selalu melayani masyarakat. "Dengan tes ini kita deteksi dini. Jangan sampai kita mengedukasi yang di bawah ternyata yang di atasnya yang pakai (narkoba)," ujar Ruslan.

Deteksi dini dari pengaruh narkoba ini sebut Ruslan, sangat penting dilakukan agar masyarakat juga bisa terus

tereduksi tentang bahaya dari narkoba itu sendiri lewat kepala kelurahan dan kampung.

Dengan hasil yang negatif dari tes urine ini, Ruslan berharap bisa menjadi nilai baik yang diteruskan kepada masyarakat. Ia berharap dengan usaha bersama, pemerintah bisa terus memerangi penyebaran narkoba.

Kepada masyarakat, BNNK berharap dapat memberikan informasi apapun dilingkungan tempat tinggalnya apabila menemui adanya kecurigaan adanya kemungkinan penggunaan narkoba. "Kerja sama dari masyarakat juga kami harapkan untuk bersama memerangi narkoba," pungkasnya. (BAPPE-DA)



Foto: Bappeda

Kasubag Umum BNNK Mimika, Ruslan Awumbas menunjukkan alat pemeriksaan urine.





# Soal Bonus Demografi Ini Pesan Pj Bupati Mimika Bagi Pelajar

**I**NDONESIA ditargetkan akan mengalami bonus demografi pada Tahun 2030 mendatang dengan perkiraan 68,3 persen penduduknya masuk usia produktif. Menghadapi fenomena tersebut Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MH menyampaikan beberapa pesan kepada para pelajar di Mimika.





Pesan itu disampaikan dalam kegiatan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mimika pada Selasa (8/8/2023) di Hotel Grand Tembaga.

Valentinus mengungkapkan bonus demografi ini menjadi menjadi peluang dan tantangan bagi Indonesia. Dimana jumlah penduduk sangat besar. "Kalau tidak berkualitas hanya akan menambah beban buat kita semua karena kita tanggung bersama. Kalau jadi pengangguran, gelandangan, pengemis jadi tanggungjawab semua," katanya.

Menurutnya, semua orang harus tahu soal bonus demografi terutama para pelajar. Perlunya pendidikan kependudukan supaya tahu berapa banyak jumlah penduduk dan cara pengendaliannya.

Pj Bupati mengatakan salah satu cara pengendalian penduduk adalah dengan mencegah pernikahan usia dini. Untuk itu pengetahuan anak usia remaja harus ditingkatkan terutama dalam hal memproteksi diri dari berbagai pengaruh negatif di tengah kemajuan teknologi. "Orang tua sudah berusaha jaga anaknya tapi HP itu sangat kejam. Atau nonton sinetron tidak sesuai usianya yang turut mempengaruhi perilaku anak," katanya.

Ditekankan Pj Bupati, bahwa pernikahan usia dini harus dicegah karena akan memberikan dampak sistemik. Seseorang yang menikah di usia dini tentu belum

memiliki mental layaknya orang tua. Sementara tuntutan sebagai orang tua adalah harus mampu memberikan kehidupan layak kepada keluarga terutama anak yang dilahirkan baik itu pendidikan dan kebutuhan hidup.

Untuk itu Pj Bupati mengajak seluruh pelajar Mimika untuk bisa memproteksi diri dari berbagai hal negatif dan lebih mengutamakan masa depan yang lebih baik dalam menghadapi bonus demografi dimana persaingan akan semakin ketat.

Salah satu langkah dari Pemkab Mimika yang akan ditegakkan Pj Bupati adalah menertibkan pelajar yang berkelir di jam sekolah. Aturan ini akan segera diberlakukan namun akan didahului dengan sosialisasi kepada seluruh sekolah. **(BAPPEDA)**

**FOTO: ILLUSTRASI**



# Timika Alami Inflasi 0,83 Persen

**P**ADA Juli 2023, Kota Timika mengalami inflasi sebesar 0,83 persen. Indeks inflasi di Kota Timika pada Juli 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika mencatat kenaikan inflasi terjadi pada kelompok pengeluaran sebesar 1,30 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32 persen dan kelompok transportasi sebesar 2,07 persen.

Kepala BPS Mimika, Ouceu Satyadipura, SST, Rabu (23/08/23)

menyebut tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2023 terhadap Juli 2022) sebesar 4,93 persen.

Sementara untuk tingkat inflasi tahun kalender Kota Timika (Juli 2023–Desember 2022) sebesar 3,22 persen. Untuk bahan makanan pada Juli 2023 mengalami inflasi sebesar 1,56 persen. Tingkat inflasi bahan makanan tahun kalender (Juli 2023–Desember 2022) sebesar 5,57 persen dan tingkat deflasi bahan ma-

kanan tahun ke tahun (Juli 2023 terhadap Juli 2022) sebesar 3,13 persen.

Khusus untuk Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,62 persen. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik di 90 kota





IHK, 90 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 1,43 persen dan inflasi terendah terjadi di Bulukumba sebesar 0,01 persen. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Tual sebesar -0,50 dan deflasi terendah terjadi di Palangkaraya dan Banjarmasin sebesar -0,01. Kota Timika menempati urutan ke-3 di Tingkat Nasional dan urutan ke 2 di tingkat Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua).

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,30 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen,

kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32 persen, kelompok transportasi sebesar 2,07 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Juli 2023, antara lain cabai rawit, beras, angkutan udara, bawang putih, dan rokok kretek filter. Sementara beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain daging ayam ras, sawi hijau, bawang merah, terong, dan air kemasan.

Pada Juli 2023 dari 11 kelompok pengeluaran, 7 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi, 4 kelompok memberikan andil inflasi, 2 kelompok memberikan andil deflasi dan 5 kelompok lainnya tidak memberikan andil terhadap inflasi maupun deflasi di Kota Timika.

Adapun kelompok pengeluaran yang memberikan andil atau sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,30 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32 persen, kelompok transportasi sebesar 2,07 persen. Kemudian kelompok yang memberikan sumbangan deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,05 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -0,07 persen.

Sementara kelompok yang tidak memberikan andil terhadap inflasi maupun deflasi di Kota Timika yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda



# Bappeda Mimika Susun SID dan DED Kawasan Wisata Ipayu

**K**AMPUNG Ipayu yang berada di Distrik Amar, menjadi salah satu kawasan prioritas dalam pengembangan wisata di Mimika. Untuk itu Pemkab

Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun dokumen Detail Engineering Design (DED) atau rancang bangun

renci serta survei investigasi desain (SID).

Sebagai tahapan penyusunan dokumen tersebut, Bappeda menggelar







Foto: Bappeda

seminar pendahuluan dengan menghadirkan konsultan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait termasuk Pemerintah Distrik Amar dan kepala kampung setempat yakni dari Kampung Ipiri, Pariipi dan Yaraya. Seminar pendahuluan digelar Selasa (22/8/2023) di ruang rapat kantor Bappeda.

Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono mengatakan Mimika tidak hanya memiliki kekayaan akan mineral tambang seperti tembaga dan emas tapi juga menyimpan potensi wisata yang belum dikelola secara serius.

Salah satu kawasan yang potensial dikembangkan adalah Kampung Ipaya menjadi daerah tujuan wisata karena memiliki pantai dan merupakan tempat bermuaranya sungai-sungai kecil dan besar yang didominasi dengan lingkungan yang alami.

Pemkab Mimika kata dia menjadikan Ipaya sebagai prioritas yang ditandai dengan penyusunan SID dan DED kawasan wisata. Sehingga dalam pengembangan dan pembangunan tetap memperhatikan standar dan kebutuhan akan fasilitas umum, hingga mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan fungsi bangunan dan sarpras yang akan dibangun. (**BAPPE-DA**)



# Penjelasan Bagian PBJ Soal Tender Proyek di Pemkab Mimika

**D**ALAM melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun pengadaan barang, pemerintah melibatkan pihak ketiga atau disebut penyedia barang dan jasa. Penentuan pihak ketiga melalui beberapa proses baik tender, non tender, pengadaan langsung dan seleksi.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Mimika, Bambang Wijaksono yang ditemui Rabu (23/8/2023) menjelaskan terkait proses penetapan pemenang tender. Ini sekaligus menjawab polemik yang terjadi dimana sekelompok pengusaha asli Papua melayangkan protes hingga memalang kantor Bagian PBJ.

Bagian PBJ kata Bambang bersedia untuk duduk bersama menyampaikan permasalahan yang dikeluhkan oleh pengusaha asli Papua yang tidak puas terhadap proses tender salah satu proyek pembangunan jalan lingkungan senilai Rp 1,8 miliar di Distrik Kwamki Narama.

Ia mengatakan, proyek dengan nilai Rp 1 miliar sampai Rp 2,5 miliar melalui proses tender terbatas khusus untuk perusahaan milik orang asli Papua. Inilah yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir. Jika ada peserta lelang non OAP maka dipastikan didiskualifikasi. Seluruh tender saat ini dilakukan secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang bisa diakses oleh siapapun.

Adapun terkait proyek jalan di Kwamki Narama, ada dua perusahaan yang berkasnya dinyatakan memenuhi syarat. Tapi tidak mungkin keduanya jadi pemenang, melainkan hanya satu. Sehingga perlu pembuktian dan dievaluasi oleh Pokja. Selama masih dalam proses ini maka belum ada keputusan final pemenang tender.



Foto: Ilustrasi

Bambang menyatakan, setiap peserta tender yang merasa keberatan memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan menyampaikan sanggahan secara resmi kepada Pokja. Bahkan sanggahan tidak hanya sekali, bisa sampai dua kali lewat sangga banding.

"Kalau sanggah belum puas, masih ada ruang sanggah banding. Kalau sanggah banding, proses tender ini berhenti mekanismenya seperti itu nanti dilimpahkan ke pengguna anggaran bukan lagi pokja. Pengguna anggaran pelajari semuanya kalau memang sanggah bandingnya benar, pengguna anggaran akan mengatakan menerima sanggah banding, kalau diterima berarti bisa tender dan evaluasi ulang, proses kembali lagi. Kalau sanggah banding ditolak berarti proses tender berlanjut," jelasnya.

Jadi keputusan Pokja ditegaskan Bambang belum bersifat mutlak. Namun

apabila tidak ada sanggahan maka para calon penyedia dianggap menerima. Jika mengajukan sanggah banding pun, penyedia harus memberikan jaminan senilai satu persen dari nilai pagu anggaran. Jika sanggah banding diterima, maka jaminan dikembalikan ke penyedia, tapi kalau ditolak dicairkan dan menjadi milik pemerintah daerah yang disetorkan langsung ke kas daerah.

Itu terkait proyek Rp 1 miliar sampai Rp 2,5 miliar lewat tender terbatas. Sementara proyek atau pengadaan barang dan jasa di bawah Rp 1 miliar melalui pengadaan langsung dan wajib diberikan kepada pengusaha OAP. Prosesnya, langsung ditunjuk. OPD bisa langsung menawarkan ke satu perusahaan saja tanpa harus memasukkan dokumen penawaran seperti kompetisi pada tender terbuka.

"Contoh pejabat pengadaan, ada paket Rp 800 juta. Setelah saya lihat persyaratan oh saya tunjuk saja yang penting perusahaannya sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Kalau cocok dan deal, kita buat SPK. Ini juga wajib pengusaha OAP, kalau tidak itu bisa dilaporkan sehingga perusahaan itu akan di-black list," tegasnya.

Kalaupun ada paket kegiatan yang misalnya membutuhkan spesifikasi khusus dan tidak ada perusahaan OAP yang memenuhi spesifikasi maka harus ditender terbuka meskipun nilainya di bawah Rp 1 miliar dan nilainya di atas Rp 200 juta.

Bambang mengungkapkan, ada banyak peluang bagi pengusaha asli Papua. Tapi persoalannya, terkadang banyak pengusaha yang nakal dengan meminjam bender milik OAP, atau bahkan pengusaha OAP itu sendiri yang tingin belajar akhirnya meminjamkan perusahaannya kepada orang lain. (BAPPEDA)



# Pemkab Mimika Dapat Kuota 1465 PPPK

**TAHUN** 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mendapat kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Informasi awal ada sebanyak 1465 formasi khusus untuk tenaga kesehatan dan guru atau pendidikan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, Ananias Faot yang ditemui di kantornya, Selasa (1/8/2023) mengatakan kuota itu terdiri dari guru atau pendidikan sebanyak 565 formasi dan tenaga kesehatan sekitar 900.

Rencananya, penetapan kuota itu akan

diserahkan langsung oleh Menteri Penerimaan dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Pj Bupati Mimika dalam waktu dekat.

Ananias menyatakan setelah penetapan formasi sudah diterima, maka Pemkab Mimika akan kembali untuk mengatur secara teknis soal perekrutan. Yang pasti kata Ananias, baik guru maupun tenaga kesehatan pasti akan menjalani tes lagi selanjutnya seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).

Adanya perekrutan PPPK ini dikatakan

Ananias, akan mengurangi jumlah honorer yang saat ini mencapai 2900 orang. Sebab honorer terbanyak adalah tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan dan RSUD Mimika yang jumlahnya seribu lebih.

la menambahkan, rencana pengadaan PPPK ini tentunya sudah mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Apalagi jika melihat rasio belanja pegawai terhadap APBD Mimika masih sangat memungkinkan karena belum mencapai 30 persen sesuai ambang batas yang dipersyaratkan untuk pengadaan CASN di kabupaten. (**BAPPEDA**)



Foto: Ilustrasi Dok.Bappeda



# Produk UMKM Mimika Kini Bisa Dibeli Lewat Aplikasi

**UNTUK** memudahkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UKM kini menyediakan platform atau aplikasi yakni UKM Mimika yang bisa didapatkan melalui PlayStore.

Dengan adanya aplikasi ini maka Diskop UKM Mimika mengajak sejumlah UMKM di Mimika untuk mulai memasarkan produknya lewat pelatihan yang digelar

selama beberapa hari di Hotel Cartenz Timika sekaligus launching aplikasi UKM Mimika.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Bertha Beanal, S.H., M.Si., saat membuka kegiatan dengan membacakan sambutan Pj. Bupati Mimika menyatakan bahwa Indonesia mempunyai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peranan penting menjadi salah satu penggerak perekonomian negara.

“Pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Mimika merupakan wahana bagi masyarakat koperasi dan pelaku UKM untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia, yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif, serta dapat menumbuhkan jiwa wirausaha yang merupakan modal dasar dalam menjalankan usaha,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, dalam menghadapi





persaingan usaha yang semakin ketat dan kompetitif di era globalisasi, pengembangan sumber daya manusia masyarakat koperasi dan UMKM menjadi salah satu skala prioritas, yang secara konsisten terus dilakukan oleh pemerintah, sebab sektor koperasi dan UMKM dinilai mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pelatihan kewirausahaan ini akan memberikan ruang kesempatan kepada pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitasnya, membuka peluang kemitraan, mengembangkan jejaring promosi usaha serta produk, untuk meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan motivasi kepercayaan diri dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.

“Kita sangat mengapresiasi peserta pelatihan ini, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilannya, menambah wawasan, pengetahuan, dan menambah pengalaman dalam hal digitalisasi bisnis, untuk selanjutnya diimplementasikan oleh seluruh pelaku UKM, dalam mengembangkan bisnis mereka, sehingga mampu menjadi pe-

laku usaha yang tangguh, mandiri, produktif dan inovatif, serta punya daya saing yang sangat kompetitif,” harap Bertha.

Ia menambahkan, pelatihan ini dapat berkontribusi nyata dalam mendorong digitalisasi koperasi dan UMKM di daerah, menuju koperasi dan UMKM modern, yang mampu beradaptasi dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Program pelatihan digital UMKM ini merupakan wujud dan komitmen pemerintah untuk memajukan, memperkuat dan memberdayakan UMKM dan ultra mikro di Indonesia, dan program ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar ada transformasi digital di Indonesia, jelasnya.

Menutup arahnya, Bertha menegaskan bahwa transformasi digital bagi koperasi dan UMKM sudah menjadi keharusan. Seiring era revolusi Industri 4.0, kegiatan ekonomi dituntut bergeser dari metode konvensional, menjadi lebih modern melalui digitalisasi. Terlebih, digitalisasi telah menjadi solusi bagi para pelaku UMKM dan koperasi untuk bertahan dan tumbuh.

Sementara itu Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UKM Mimika, Samuel Yogi mengatakan, kegiatan pendidikan dan pelatihan UKM bagi pelaku UKM dalam daerah kabupaten/kota, termuat pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No.1 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Mimika.

“Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan UKM, serta kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) usaha kecil menengah. Juga tersedianya perkembangan SDM bagi pelaku UKM, serta untuk memperbaiki kinerja para pelaku UKM. Selain itu bertujuan untuk memutakhirkan keahlian para pelaku UKM, sejalan dengan perubahan teknologi menuju go digital. Di samping, untuk membantu memecahkan masalah operasional dan untuk mempersiapkan para pelaku UKM yakni bagaimana cara melakukan promosi produk dengan baik, ujarnya.(BAPPEDA)







*Mimika Membangun*